

Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Permintaan Agregat: Studi Kasus di Negara Indonesia

Citra Wulandari Manik¹ Krisnawati Silaban² Mahlina Putri Mnurung³ Rachel Meylani Situmorang⁴ Rut Afentina Sinambela⁵ Putri Sari Margaret Julianty Silaban⁶

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: krisnawatisilaban5@gmail.com²

Abstrak

Dampak kebijakan fiskal terhadap permintaan agregat Indonesia adalah fokus penelitian ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data dengan melakukan penelitian literatur dan pencarian data sekunder dari berbagai sumber, seperti jurnal, buku, artikel, dan publikasi elektronik (internet). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia secara khusus memengaruhi permintaan agregat negara dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek melalui efek pendapatan dan efek pergantian. Efek pendapatan terjadi ketika pajak atau pengeluaran pemerintah mengubah pendapatan disposibel rumah tangga. Dalam jangka panjang, kebijakan fiskal Indonesia telah menunjukkan efek yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan.

Kata Kunci: Ekonomi Makro, Permintaan Agregat, Kebijakan Fiskal



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal merupakan instrumen kebijakan makroekonomi yang mendukung intervensi pemerintah dalam perekonomian. Berbagai pilihan biasanya digunakan untuk menunjukkan intervensi pemerintah dalam perekonomian. Secara khusus, hal ini menentukan berapa banyak yang diterima atau dibelanjakan pemerintah, yang pada gilirannya mempengaruhi keseimbangan anggaran. Kebijakan fiskal adalah penggunaan pajak, pinjaman, dan belanja publik oleh pemerintah untuk stabilitas atau pembangunan. Kebijakan fiskal biasanya membantu mencapai pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Merupakan bagian dari kebijakan publik dan merupakan ukuran kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal pengeluaran dan penerimaan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Stabilitas perekonomian, alokasi sumber daya, dan distribusi pendapatan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal. Kebijakan makroekonomi, atau kebijakan fiskal, dirancang untuk mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pajak, pendapatan pemerintah, dan pengeluaran pemerintah. Langkah-langkah ini dapat digunakan untuk menstabilkan permintaan agregat, distribusi pendapatan, alokasi sumber daya, dan kegiatan ekonomi secara umum. Jika permintaan agregat tidak cukup untuk menutupi lapangan kerja agregat, pemerintah harus meningkatkan belanja fiskal dan memotong pajak. Sebaliknya, jika permintaan agregat terlalu tinggi dan terdapat risiko kenaikan inflasi, pemerintah harus memotong anggaran nasional dan meningkatkan pendapatan pajak. (Nizar, 2010).

Permintaan agregat adalah jumlah barang yang dibutuhkan dalam suatu perekonomian yang menunjukkan jumlah barang dan layanan yang dibeli pada titik harga tertentu. Fluktuasi ekonomi jangka pendek, atau iklan, biasanya diukur dengan model permintaan agregat. Model AD, yang berasal dari model IS-LM, memiliki tingkat harga tetap konstan. Kurva permintaan agregat menunjukkan jumlah barang dan jasa yang diinginkan dalam setiap perekonomian pada setiap tingkat harga. Dengan kata lain, jika semua hal dianggap sama, peningkatan

jumlah barang dan jasa yang diinginkan cenderung dihasilkan dari penurunan tingkat harga umum dalam suatu perekonomian. Model IS-LM menyeimbangkan pasar keuangan dan industri riil; ini adalah interpretasi penting dari teori Keynes dan bertujuan untuk menunjukkan apa yang memengaruhi pendapatan nasional pada tingkat harga tertentu dan bagaimana tingkat harga memengaruhi pendapatan jangka pendek. Ini adalah dasar dari model permintaan agregat. Persamaan pengeluaran nyata di atas terdiri dari total konsumsi, investasi, biaya pemerintah, dan ekspor bersih. Karena itu, fungsi persamaan adalah $Y = C + I + G + NX$. Biaya yang direncanakan sama dengan biaya yang sebenarnya dalam ekonomi terbuka, sehingga Anda mendapatkan persamaan berikut:

$$Y = E$$

$$E = C + I + G + NX$$

$$C = f(Y-T)$$

Ketika tingkat harga dalam model IS-LM berubah, permintaan total menurun. Jumlah uang beredar keseimbangan riil M/P menurun seiring dengan tingkat harga P untuk setiap jumlah uang beredar. Sebaliknya, ketika penawaran keseimbangan uang riil menurun, model LM bergeser ke atas dan tingkat bunga ekuilibrium meningkat. Tetapi kenaikan harga mengurangi pendapatan. Hubungan antara pendapatan nasional dan tingkat harga negatif ditunjukkan oleh permintaan agregat. Oleh karena itu, ketika tingkat harga dan pendapatan berubah, permintaan agregat berada dalam keseimbangan dalam model IS-LM. Semua perubahan pendapatan dalam model IS-LM menyebabkan perubahan permintaan secara umum, kecuali perubahan tingkat harga. Perubahan permintaan agregat dipengaruhi oleh guncangan pasar barang (IS) dan pasar keuangan (LM).

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode non-partisipasi untuk mendapatkan data tentang "Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Permintaan Agregat: Studi Kasus di Indonesia". Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder dari berbagai sumber, seperti buku, artikel, jurnal, dan publikasi online.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kebijakan fiskal membantu mengubah pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian (Sukirno, 2003). Kebijakan fiskal biasanya dirancang untuk mempengaruhi permintaan di seluruh perekonomian dalam jangka pendek. Hal ini mungkin juga mempunyai dampak jangka panjang terhadap pasokan, misalnya melalui peningkatan kapasitas ekonomi (Surjaningsih dkk, 2012). Kebijakan fiskal digunakan oleh pemerintah untuk stabilisasi ekonomi. Kebijakan fiskal adalah alat untuk menstabilkan perekonomian negara. Pengeluaran dan penerimaan pemerintah diatur dalam APBN Indonesia setiap tahun oleh kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah. Fakta yang konsisten tentang bagaimana kebijakan fiskal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, khususnya bagaimana mereka mengatur penerimaan dan pengelolaan pengeluaran pemerintah, menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kebijakan fiskal Indonesia telah berkembang dari zaman ke zaman. Pergeseran sistem kebijakan fiskal ini diciptakan untuk menjaga stabilitas perekonomian setelah terjadi gejolak ekonomi yang signifikan. Pemerintah Orde Baru membuat kebijakan anggaran yang berimbang dan berubah-ubah untuk mengatasi hiperinflasi. Selain itu, perubahan dan pembaharuan dalam sistem penerimaan pajak berdampak pada ekonomi

Indonesia karena upaya untuk meningkatkan penerimaan pemerintah. Ini mempengaruhi keuangan negara. Reformasi pemungutan pajak 1994 dan 1997 dilakukan dengan tujuan meningkatkan otonomi pembiayaan pembangunan dan efisiensi pemungutan pajak pemerintah.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menentukan bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja pemerintah. Oleh karena itu, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak pemerintah, penerimaan negara bukan pajak, dan pengeluaran pemerintah. Data sekunder untuk triwulan 1990–2012 diperoleh dari Laporan Keuangan Bank Indonesia (SEKI). Analisis deskriptif dan metode analisis *Error Correction Model* (ECM) adalah dua jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut analisis, instrumen kebijakan fiskal, yaitu pajak dan penerimaan negara bukan pajak, memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka pendek, tetapi tidak memberikan kontribusi dalam jangka panjang. Selain itu, hanya pendapatan pemerintah dalam bentuk pajak yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Analisis jangka panjang menunjukkan bahwa penerimaan negara bukan pajak meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih cepat daripada pajak. Oleh karena itu, penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter Indonesia mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara, berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yang diukur dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara pemasok mempunyai dampak paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akibatnya, pemerintah harus memantau dan memaksimalkan potensi sumber pendapatan pemerintah, baik pajak maupun non-pajak. Teori Harrod-Domar menyatakan bahwa pembentukan modal merupakan syarat utama untuk pertumbuhan ekonomi yang baik atau berkelanjutan. Penelitian ini mendukung teori ini.

Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Konsumsi Rumah Tangga, Investasi, dan Ekspor Indonesia

Kebijakan fiskal adalah tindakan pemerintah terkait pengeluaran dan pendapatan negara. Pengaruhnya terhadap konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor Indonesia dapat cukup signifikan. Salah satu cara untuk mengontrol keseimbangan makro ekonomi adalah dengan menggunakan kebijakan fiskal. Kebijakan ini bertujuan untuk memengaruhi sisi permintaan agregat perekonomian dalam jangka pendek, serta sisi penawaran dalam jangka panjang melalui peningkatan kapasitas perekonomian.

Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Konsumsi Rumah Tangga

- a. Peningkatan Pengeluaran Pemerintah: Jika pemerintah meningkatkan pengeluaran melalui kebijakan fiskal (contohnya, menurunkan pajak), hal ini dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga.
- b. Pajak dan Subsidi: Peningkatan atau pengurangan pajak juga dapat mempengaruhi jumlah uang yang tersedia untuk digunakan oleh rumah tangga. Subsidi terhadap barang-barang tertentu juga dapat mempengaruhi keputusan konsumsi.
- c. Pajak Konsumsi: Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi konsumsi rumah tangga melalui perubahan dalam tarif pajak konsumsi. Peningkatan tarif pajak dapat mengurangi daya beli konsumen karena barang dan jasa menjadi lebih mahal.
- d. Transfer Pembayaran: Program pemberian bantuan langsung atau subsidi juga dapat mempengaruhi konsumsi. Jika pemerintah memberikan insentif keuangan kepada rumah tangga melalui program sosial atau subsidi, itu dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi.

Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Investasi

- a. Pajak dan Insentif Investasi: Kebijakan fiskal dapat mencakup insentif pajak untuk perusahaan yang berinvestasi. Hal ini dapat meningkatkan investasi dalam sektor-sektor tertentu.
- b. Infrastruktur dan Pengeluaran Publik: Investasi dalam infrastruktur oleh pemerintah (misalnya, pembangunan jalan, pelabuhan, dll.) dapat mendorong investasi swasta karena menciptakan lingkungan yang lebih kondusif.
- c. Pajak Investasi: Kebijakan fiskal dapat merinci tarif pajak yang berlaku untuk investasi. Jika tarif pajaknya rendah, itu dapat mendorong investasi swasta karena tingkat pengembalian investasi menjadi lebih menarik.
- d. Pengeluaran Publik: Pemerintah dapat meningkatkan investasi dengan meningkatkan pengeluaran publik untuk proyek infrastruktur atau proyek-proyek strategis lainnya. Ini dapat menciptakan peluang investasi baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Ekspor

- a. Nilai Tukar Mata Uang: Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang, yang pada gilirannya dapat memengaruhi daya saing ekspor.
- b. Insentif Ekspor: Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal khusus untuk sektor ekspor, seperti pembebasan pajak atau subsidi untuk meningkatkan daya saing produk.
- c. Pajak Ekspor: Pemerintah dapat menggunakan tarif pajak ekspor untuk mengendalikan jumlah barang yang diekspor. Peningkatan tarif pajak ekspor dapat memperlambat ekspor dan membantu mempertahankan pasokan domestik.
- d. Insentif Ekspor: Sebaliknya, memberikan insentif fiskal kepada perusahaan yang terlibat dalam ekspor dapat meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekspor.

Secara keseluruhan, kebijakan fiskal memiliki dampak langsung dan tidak langsung pada konsumsi, investasi, dan ekspor. Pengaturan pajak dan pengeluaran publik adalah instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam perekonomian, termasuk merangsang pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mengatur neraca perdagangan. Dampak kebijakan fiskal tidak selalu langsung dan tergantung pada berbagai faktor seperti kebijakan moneter, situasi ekonomi global, dan lainnya. Selain itu, kebijakan fiskal harus sejalan dengan tujuan jangka panjang perekonomian dan stabilitas makroekonomi.

Apa perbedaan dampak kebijakan fiskal terhadap berbagai sektor perekonomian Indonesia ?

Dampak ekonomi dari kebijakan fiskal melalui pendekatan permintaan agregat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan Keynesian. Pendekatan Keynesian mengasumsikan harga stabil dan kelebihan kapasitas, dan produksi ditentukan berdasarkan permintaan agregat (selanjutnya). Keynes percaya bahwa ekonomi pasar tidak dapat pulih selama resesi tanpa campur tangan pemerintah. Meskipun suku bunga biasanya rendah dan bahkan bisa turun hingga nol selama resesi, kebijakan moneter tidak mampu menstimulasi perekonomian karena hanya mengandalkan penurunan suku bunga. Pendekatan Keynesian berpendapat bahwa kebijakan fiskal dapat meningkatkan ekonomi karena peningkatan belanja publik atau penurunan pajak mempunyai efek pengganda, yaitu meningkatkan permintaan domestik untuk barang konsumsi. Dengan cara yang sama ketika pemerintah menurunkan pajak untuk mendorong perekonomian. Pendapatan yang dapat dibelanjakan meningkat ketika pajak dikurangi, yang berdampak pada permintaan. Rantai ekonomi menghasilkan peningkatan konsumsi dan produksi melalui peningkatan kecenderungan

mengonsumsi marjinal (MPC) rumah tangga. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan dampak kebijakan fiskal terhadap sektor perekonomian Indonesia, yaitu:

1. Jenis kebijakan perpajakan. Jenis kebijakan fiskal dibedakan menjadi dua jenis yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Di sisi lain, kebijakan fiskal yang bersifat restriktif, seperti menaikkan pajak atau memotong pengeluaran pemerintah, seringkali berdampak negatif pada sektor-sektor tersebut.
 - a. Revitalisasi kebijakan fiskal dalam bentuk subsidi dan bantuan sosial bagi usaha kecil dan menengah akan berdampak positif pada sektor-sektor yang terkena dampak pandemi, seperti pariwisata, transportasi, dan perdagangan. Sebab, permintaan dan pendapatan di sektor-sektor tersebut turun signifikan selama pandemi.
 - b. Kontroversi kebijakan fiskal berupa kenaikan pajak berdampak negatif terhadap daya beli dan konsumsi masyarakat. Hal ini berdampak negatif pada sektor-sektor yang berorientasi konsumen seperti ritel, makanan dan minuman, serta jasa.
2. Kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian juga dapat mempengaruhi dampak kebijakan fiskal. Dampak kebijakan fiskal yang diterapkan pada perekonomian yang sedang dalam masa pemulihan biasanya lebih kecil dibandingkan dampak kebijakan fiskal pada perekonomian yang mengalami penurunan. Misalnya saja, peningkatan pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur publik yang dikombinasikan dengan kebijakan fiskal yang bersifat stimulatif mempunyai dampak yang lebih besar terhadap perekonomian pada saat resesi dibandingkan pada saat pemulihan. Pembangunan infrastruktur memang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
3. Karakteristik sektor ini. Setiap sektor mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu dampak kebijakan fiskal terhadap sektor ini juga berbeda-beda. Misalnya kebijakan fiskal yang ditujukan pada sektor pertanian mempunyai dampak yang lebih besar dibandingkan kebijakan fiskal yang ditujukan pada industri.
 - a. Kebijakan perpajakan yang menyasar sektor pertanian, seperti pupuk dan subsidi harga, berdampak positif terhadap produktivitas sektor pertanian dan perkembangannya. Sektor pertanian merupakan sektor penting bagi perekonomian Indonesia dan mempunyai peranan strategis dalam menjaga ketahanan pangan.
 - b. Kebijakan fiskal yang ditujukan pada sektor industri, seperti insentif investasi dan kemudahan perizinan, berdampak positif terhadap daya saing industri manufaktur dan mendorong pertumbuhannya. Memang sektor industri merupakan sektor yang mempunyai potensi besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, ketika merencanakan dan melaksanakan kebijakan fiskal, pemerintah harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dampak kebijakan tersebut pada sektor-sektor tertentu perekonomian Indonesia.

Kebijakan fiskal Indonesia terutama mempengaruhi permintaan agregat negara tersebut baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengenai pendapatan dan belanja negara disebut kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi permintaan agregat terutama melalui dua cara: pajak dan belanja publik. Dalam jangka pendek, kebijakan fiskal dapat mempengaruhi permintaan agregat melalui pendapatan dan efek pendapatan. Dampak pendapatan terjadi ketika pajak atau belanja pemerintah mengubah pendapatan rumah tangga yang dapat dibelanjakan. Menaikkan pajak mengurangi pendapatan rumah tangga sehingga mengurangi konsumsi dan permintaan agregat. Di sisi lain, pemotongan pajak meningkatkan pendapatan per rumah tangga, sehingga meningkatkan konsumsi dan permintaan agregat, namun efek penyeimbangan terjadi ketika perubahan pajak atau pengeluaran pemerintah mengubah hubungan antara konsumsi dan tabungan. Menaikkan

pajak mendorong rumah tangga untuk menabung lebih banyak, sehingga mengurangi konsumsi dan permintaan agregat. Di sisi lain, pemotongan pajak mendorong rumah tangga untuk membelanjakan lebih banyak, sehingga meningkatkan konsumsi dan permintaan agregat.

Dalam jangka panjang, kebijakan fiskal dapat mempengaruhi permintaan agregat melalui efek investasi. Perbaikan infrastruktur publik dan proyek pembangunan lainnya dapat mendorong investasi swasta. Menurut "Analisis Dampak Kebijakan Keuangan Terhadap Permintaan Agregat di Indonesia"; Yulianti dkk. (2023), baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, kebijakan fiskal Indonesia memengaruhi permintaan agregat secara signifikan. Dalam jangka pendek, kebijakan stimulatif seperti pemotongan pajak dan peningkatan belanja pemerintah telah terbukti efektif dalam meningkatkan permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi. Ini terbukti dengan laju pertumbuhan PDB Indonesia pada tahun 2021 dan 2022, yang sebagian besar dipengaruhi oleh kebijakan fiskal stimulatif. Dalam jangka panjang, mendorong kebijakan fiskal juga terbukti efektif dalam meningkatkan investasi swasta. Hal ini tercermin dari pertumbuhan investasi swasta di Indonesia pada tahun 2022. Kebijakan fiskal Indonesia telah terbukti meningkatkan permintaan agregat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, pemotongan pajak dan peningkatan belanja pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan permintaan agregat, dan dalam jangka panjang, ini mendorong investasi swasta. Salah satu alat terpenting yang dapat digunakan pemerintah untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan permintaan agregat adalah kebijakan fiskal. Namun, untuk mencegah efek yang tidak diinginkan, kebijakan moneter harus dibuat dengan hati-hati.

Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah instrumen ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk memengaruhi aktivitas ekonomi negara. Ini melibatkan pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Pengeluaran pemerintah melibatkan anggaran belanja untuk berbagai program dan proyek, sementara perpajakan mencakup pengumpulan pendapatan negara melalui pajak dan subsidi.

Kebijakan Fiskal di Indonesia

Di Indonesia, kebijakan fiskal telah digunakan untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi. Anggaran belanja pemerintah mencakup pengeluaran untuk sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan subsidi energi. Perpajakan melibatkan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan berbagai jenis pajak lainnya.

Pembentukan Modal

Pembentukan modal mencakup investasi dalam ekonomi, yang dapat berupa investasi swasta atau investasi pemerintah. Ini juga melibatkan peningkatan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas publik lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Permintaan Agregat

Permintaan agregat adalah jumlah keseluruhan permintaan barang dan jasa dalam suatu ekonomi pada suatu waktu tertentu. Ini mencakup beberapa komponen:

1. Konsumsi: Pengeluaran oleh rumah tangga untuk barang dan jasa.
2. Investasi: Pengeluaran perusahaan untuk pembelian barang modal, peningkatan stok, dan investasi lainnya.
3. Pengeluaran Pemerintah: Pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa publik.

4. Net Ekspor: Ekspor bersih (ekspor dikurangi impor), yang mencerminkan hubungan perdagangan internasional.

Dampak Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dapat memengaruhi permintaan agregat melalui beberapa cara. Sebagai contoh, peningkatan pengeluaran pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan permintaan agregat. Pemotongan pajak dapat meningkatkan konsumsi masyarakat, sementara peningkatan pajak dapat mengurangi konsumsi. Dampak kebijakan fiskal tergantung pada berbagai faktor, termasuk ukuran dan jenis perubahan yang diterapkan.

Studi Kasus di Indonesia

PDB Indonesia			
Tahun 2011-2022			
Tahun	PDB	Tahun	PDB
2011	7.287.635,30	2017	9.912.928,10
2012	7.727.083,40	2018	10.425.851,90
2013	8.156.497,80	2019	10.494.155,40
2014	8.564.866,60	2020	10.722.999,30
2015	8.982.517,10	2021	11.120.077,90
2016	9.434.613,40	2022	19.588.000,04

Sebagai studi kasus terkini, kita dapat mengacu pada data BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021-2022. Pada tahun 2021, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat, yang disebabkan oleh pemulihan ekonomi setelah dampak pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan dalam konsumsi masyarakat dan investasi.



Pertumbuhan PDB Indonesia (2011-2022):

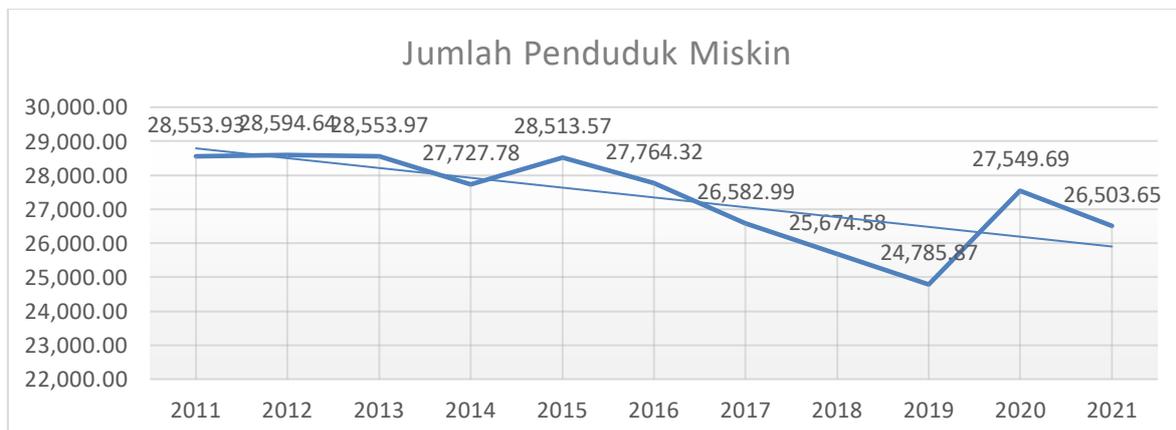
1. **2011-2015: Konsistensi Pertumbuhan** Pada tahun 2011, PDB Indonesia mencapai 7.287.635,30 miliar Rupiah dan terus meningkat setiap tahun hingga mencapai 8.982.517,10 miliar Rupiah pada tahun 2015. Pertumbuhan ini menunjukkan konsistensi ekonomi Indonesia selama periode tersebut.
2. **2016-2020: Peningkatan Signifikan** Periode 2016-2020 menyaksikan peningkatan signifikan dalam PDB, mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan nilai 10.722.999,30 miliar Rupiah. Faktor-faktor seperti investasi, konsumsi, dan ekspor mungkin telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang pesat selama periode ini.

3. **Pengaruh Pandemi (2020):** Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang kuat hingga 2020, perhatian khusus perlu diberikan pada pengaruh pandemi COVID-19. Meskipun PDB masih meningkat pada tahun 2020, pertumbuhan ini mungkin telah terpengaruh oleh dampak pandemi.
4. **2021-2022: Lonjakan PDB** Tahun 2021 dan 2022 menunjukkan lonjakan yang luar biasa dalam PDB Indonesia, mencapai 11.120.077,90 miliar Rupiah pada 2021 dan kemudian melonjak tajam menjadi 19.588,000,04 miliar Rupiah pada 2022. Faktor apa yang menyebabkan lonjakan ini perlu diteliti lebih lanjut, karena lonjakan yang signifikan seperti ini mungkin diakibatkan oleh peristiwa luar biasa.

Namun, pada tahun 2022, mungkin ada penurunan pertumbuhan ekonomi akibat berbagai faktor seperti inflasi, perubahan dalam pengeluaran pemerintah, atau ketidakpastian eksternal.

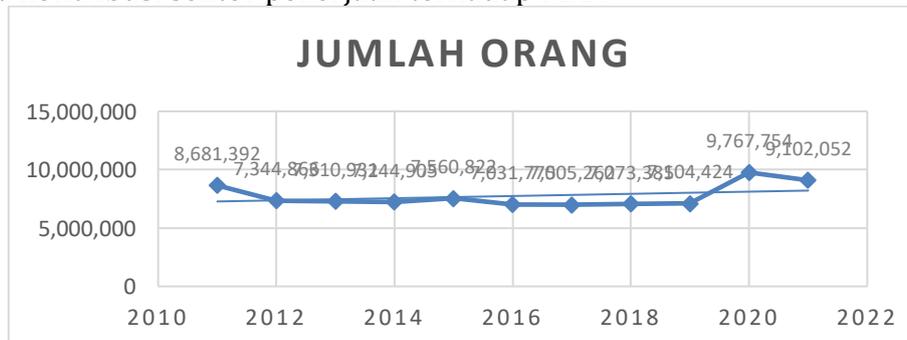
Kemiskinan Dalam Satuan Masyarakat Miskin			
Tahun 2011-2021			
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
2011	28.553,93	2017	26.582,99
2012	28.594,64	2018	25.674,58
2013	28.553,97	2019	24.785,87
2014	27.727,78	2020	27.549,69
2015	28.513,57	2021	26.503,65
2016	27.764,32		

Setelah tahun 2014, jumlah penduduk miskin kembali mengalami fluktuasi, dengan peningkatan pada tahun 2015 dan penurunan pada tahun 2016. Pada tahun 2017, terjadi penurunan yang cukup tajam mencapai 26.582,99, menandakan potensi keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan pada periode tersebut. Meskipun terdapat penurunan hingga tahun 2019, namun pada tahun 2020 dan 2021, terjadi kenaikan yang cukup signifikan kembali. Fluktuasi jumlah penduduk miskin dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan faktor-faktor sosial. Pada periode tertentu, upaya pemerintah dalam mengimplementasikan program-program penanggulangan kemiskinan mungkin memberikan dampak positif, seperti terlihat pada tahun 2017. Namun, perubahan kondisi ekonomi global atau nasional, bencana alam, atau perubahan kebijakan dapat memberikan kontribusi terhadap fluktuasi tersebut. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor apa yang memiliki dampak signifikan pada dinamika kemiskinan dalam satu masyarakat miskin.



Tingkat Pengangguran (Jumlah Orang)			
Tahun 2011-2021			
Tahun	Jumlah Orang	Tahun	Jumlah Orang
2011	8.681.392	2017	7.005.262
2012	7.344.866	2018	7.073.385
2013	7.310.931	2019	7.104.424
2014	7.244.905	2020	9.767.754
2015	7.560.822	2021	9.102.052
2016	7.031.775		

Pada tahun 2011, jumlah orang yang menganggur mencapai 8.681.392 orang. Namun, pada tahun berikutnya, terjadi penurunan yang signifikan, dengan tingkat pengangguran turun menjadi 7.344.866 orang pada tahun 2012. Tren penurunan berlanjut hingga 2015, di mana tingkat pengangguran mencapai titik terendah dalam periode tersebut, yaitu 7.031.775 orang. Namun, setelah mencapai titik terendah, terjadi kecenderungan kenaikan yang cukup tajam. Pada tahun 2020, jumlah orang yang menganggur melonjak menjadi 9.767.754 orang, meningkat lebih dari 2 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2021, tingkat pengangguran masih tinggi, mencapai 9.102.052 orang. Beberapa faktor dapat menjadi penyebab fluktuasi tingkat pengangguran di Indonesia. Perubahan ekonomi global, krisis keuangan, serta pandemi COVID-19 dapat menjadi faktor utama yang memengaruhi lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan pemerintah, investasi dalam sektor-sektor tertentu, dan pertumbuhan sektor informal juga turut berperan dalam membentuk tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat memiliki dampak yang signifikan baik secara sosial maupun ekonomi. Secara sosial, meningkatnya pengangguran dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, peningkatan tingkat kemiskinan, dan penurunan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, dampak ekonomi melibatkan penurunan daya beli masyarakat, penurunan pajak yang diterima pemerintah, dan berkurangnya kontribusi sektor pekerjaan terhadap PDB.



KESIMPULAN

Studi menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia memengaruhi pertumbuhan ekonomi negara, dengan dampak yang signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang diukur dengan pendapatan sektor pemerintah, pengeluaran dan pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara yang paling mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah negara pengirim, dan kebijakan fiskal juga berdampak signifikan terhadap konsumsi domestik, investasi, dan ekspor Indonesia. Pendekatan Keynesian menganggap stabilitas harga dan kelebihan kapasitas sebagai pengaruh kebijakan fiskal terhadap perekonomian, di mana output ditentukan oleh permintaan agregat. Meskipun suku bunga pada umumnya rendah dan bahkan mungkin nol selama resesi, Keynes berpendapat bahwa tanpa intervensi pemerintah, perekonomian pasar tidak akan pulih selama resesi. Baik

dalam jangka pendek maupun jangka panjang, kebijakan fiskal Indonesia memengaruhi permintaan agregat negara melalui pengaruhnya terhadap pendapatan dan upah. Ketika pajak atau pengeluaran pemerintah mengubah pendapatan rumah tangga yang dapat dibelanjakan, hal ini disebut efek pendapatan. Menaikkan pajak akan mengurangi pendapatan rumah tangga sehingga mengurangi konsumsi dan permintaan agregat. Di sisi lain, pemotongan pajak meningkatkan pendapatan rumah tangga yang dapat dibelanjakan, sehingga meningkatkan konsumsi dan permintaan agregat. Pada saat yang sama, kebijakan fiskal Indonesia mempunyai dampak jangka panjang yang penting terhadap permintaan agregat, pasalnya pemotongan pajak dan peningkatan belanja pemerintah dapat menarik investasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Penulis dapat memberikan masukan agar pemerintah dapat mengelola dan memaksimalkan potensi sumber penerimaan negara baik di sektor pajak maupun non-pajak. Hasil penelitian ini mendukung teori Harrod-Domar bahwa pembentukan modal merupakan prasyarat terpenting bagi pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkelanjutan. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan dalam melakukan penelitian ini, antara lain metode pengumpulan data penelitian yang bersifat non-partisipatif melalui observasi dan penelitian dokumenter, termasuk pemulihan data sekunder. Untuk memahami topik penelitian lebih dalam, kami memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti majalah, buku, artikel, dan publikasi elektronik (Internet). Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi topik penelitian secara lebih rinci dan untuk membantu memperbaiki peraturan yang ada di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, Muhammad. (2019). *Analisis Interaksi Kebijakan Fiskal dan Moneter Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 5(2), 113-123.
- Amin, Nurul. (2012). *Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 1(1), 69-98.
- Isnaini, Desi. (2017). *Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara*. Jurnal System IAIN Bengkulu, 3(1), 102-118.
- Nizar, Muhammad Afdi. (2015). *Siklikalitas Kebijakan Fiskal Di Indonesia*. Jurnal Keuangan dan Moneter, 14(1), 55-82.
- Rantebua, Sem, dkk. (2020). *Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP), 5(1), 1-11.
- Rosya, Nilmadesri, dkk. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Agregat Di Sumatera Barat*. Journal of Economic and Economic Education, 5(2), 151-157.
- Sirait, Yani Magdalena. (2013). *Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- Surjaningsih Ndari. 2012. *Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output Dan Inflasi*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 389-420.
- Wijayanti, Angeline, Ngadiman. (2023). *Peran Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Resesi Ekonomi Akibat Dampak Pandemi Covid-19*. Jurnal Kontemporer Akuntansi, 3(1), 1-10.
- Yulianti, T., Sari, P., & Sari, S. (2023). *Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Permintaan Agregat Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 26(1), 1-12.